



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

# 2025

**PENGADILAN NEGERI PALEMBANG  
KELAS 1A KHUSUS**

Jl. Kapten A.Rivai No.16 Palembang  
Sumatera Selatan 30129

Telp. (0711) 313555 Fax. (0711) 313555/363310

e-mail: [pnpalembang@gmail.com](mailto:pnpalembang@gmail.com)

website: [www.pn-palembang.go.id](http://www.pn-palembang.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar, termasuk dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif mengenai pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus di Tahun 2025, yang meliputi tugas pokok dan tugas penunjang. Tugas tersebut meliputi tugas Bidang Teknis Yudisial, Administrasi Kepaniteraan, Administrasi Kesekretariatan, Bidang Pengawasan serta Bidang Pengadaan Sarana dan Prasarana Fisik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok dan fungsi yang telah kami laksanakan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik di bidang Administrasi Teknis Yudisial maupun Administrasi Non Teknis Yudisial, oleh karena itu pengawasan, evaluasi serta pembinaan dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Tahun 2025 ini kami sajikan, dengan harapan dapat memberikan manfaat dan informasi berguna bagi kita semua dalam rangka mewujudkan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi pada tahun-tahun berikutnya.

Palembang, 10 Januari 2026

KETUA

PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS

DR. I NYOMAN WIGINA, S.H., M.H.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II KEADAAN PERKARA</b>	<b>6</b>
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Palembang	7
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	8
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	8
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	9
B. Penyelesaian Perkara	10
1. Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	10
2. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	10
3. Perkara yang Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	11
4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil melalui Mediasi	11
5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi	11
6. Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court	12
7. Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	12
8. Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara Elektronik (e-Berpadu)	12
C. Capaian Prioritas Nasional	12
1. Posbakum	12
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	13
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	13
<b>BAB III SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>14</b>
Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	15
A. Mutasi	17
B. Promosi	18
C. Pensiun	20
D. Diklat	20
<b>BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARPRAS DAN TI</b>	<b>23</b>
A. Pengelolaan Keuangan	24
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	25
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	29
<b>BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>33</b>
A. Akreditasi Penjamin Mutu	34
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	38
C. Inovasi Pelayanan Publik	40
<b>BAB VI PENGAWASAN</b>	<b>44</b>
A. Internal	45
B. Evaluasi	49
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan	51
B. Rekomendasi	53
<b>LAMPIRAN</b>	<b>54</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Palembang	vi
Tabel 2	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang	viii
Tabel 3	Profil Ketua Pengadilan Negeri Palembang	xiii
Tabel 4	Profil Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang	xiv
Tabel 5	Profil Panitera Pengadilan Negeri Palembang	xxii
Tabel 6	Profil Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang	xxiii
Tabel 7	Peristiwa Penting 2025	xxvii
Tabel 8	Keadaan Perkara Pidana Biasa dan Pidana Khusus	7
Tabel 9	Keadaan Perkara Perdata Biasa dan Perdata Khusus	7
Tabel 10	Keadaan Perkara Tingkat Banding	8
Tabel 11	Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	8
Tabel 12	Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	9
Tabel 13	Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	10
Tabel 14	Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Tepat Waktu	10
Tabel 15	Jumlah Sisa Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	11
Tabel 16	Jumlah Perkara yang Berhasil Mediasi	11
Tabel 17	Jumlah Perkara yang Berhasil Melalui Diversi	11
Tabel 18	Jumlah Anggaran dan Layanan Hukum Posbakum	12
Tabel 19	Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan	13
Tabel 20	Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan	15
Tabel 21	Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan/Golongan	16
Tabel 22	Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan	16
Tabel 23	Mutasi Masuk Hakim dan Pegawai	17
Tabel 24	Mutasi Keluar Hakim dan Pegawai	17
Tabel 25	Promosi Masuk Hakim dan Pegawai	19
Tabel 26	Promosi Keluar Hakim dan Pegawai	19
Tabel 27	Pensiun Hakim dan Pegawai	20
Tabel 28	Pendidikan dan Pelatihan Hakim dan Pegawai	20
Tabel 29	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01	24
Tabel 30	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03	24
Tabel 31	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	24
Tabel 32	Data Tanah	25
Tabel 33	Data Tanah dan Gedung	25
Tabel 34	Data Kendaraan Dinas	27
Tabel 35	Data Keadaan Rumah Dinas	27
Tabel 36	Data Sarana dan Prasarana Gedung	27
Tabel 37	Jumlah Perkara Masuk Melalui E-Court	29
Tabel 38	Berkas Masuk Perkara Pidana melalui E-Berpadu	31
Tabel 39	Berkas Masuk Perkara Tipikor melalui E-Berpadu	32
Tabel 40	Rangkaian Kegiatan Program AMPUH	37
Tabel 41	Berkas Masuk Perkara Tipikor melalui E-Berpadu	39

Tabel 42	Susunan Hakim Pengawas Bidang	46
Tabel 43	Jadwal Kegiatan Rapat Berjenjang dan Rapat Bulanan	47
Tabel 44	Jadwal Pengawasan Reguler Pengadilan Tinggi Palembang	48

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palembang	x
Bagan 2	Tujuan Pengadilan Negeri Palembang	xi
Bagan 3	Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Palembang	xi
Bagan 4	Fungsi Pengadilan Negeri Palembang	2
Bagan 5	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang	5

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Profil Hakim Karir Pengadilan Negeri Palembang	xvi
Gambar 2	Profil Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palembang	xix
Gambar 3	Profil Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri Palembang	xx
Gambar 4	Pelaksanaan Sosialiasai e-berpadu	3
Gambar 5	Sertifikat "Unggul" AMPUH	4
Gambar 6	KPN Palembang menerima Penghargaan EIS Terbaik PN Kelas 1 A Khusus	30
Gambar 7	Tampilan Awal ARIN	40
Gambar 8	Halaman Login ARIN	41
Gambar 9	Folder Arsip ARIN	41
Gambar 10	Tampilan daftar arsip dokumen di ARIN	41
Gambar 11	Tampilan Awal ARISMA	42
Gambar 12	Tampilan Formulir Permohonan Magang	42
Gambar 13	Tampilan Formulir Permohonan Riset/Penelitian	42
Gambar 14	Halaman Awal MONPERA	43
Gambar 15	Menu-menu di Aplikasi Monpera	43
Gambar 16	Pengawasan Reguler Pengadilan Tinggi Palembang	47
Gambar 17	Entry Meeting dan Closing Meeting Evaluasi SMAP oleh BAWAS MA RI	48

**TENTANG**  
**PENGADILAN NEGERI**  
**PALEMBANG**

## A. SEJARAH PENGADILAN

Pengadilan Negeri Palembang pada awalnya dikenal dengan nama Kantor LAANDRAAD. Terletak di daerah Sayangan Pasar 16 dan sampai sekarang dikenal dengan Jalan Pengadilan. Pada Tahun 1971, Pengadilan Negeri Palembang menempati gedung yang baru dibangun, terletak di Jl. Kapten A.Rivai Nomor 16 Palembang hingga sekarang.

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Palembang berada di bawah Departemen Hukum dan HAM. Setelahnya, seluruh Pengadilan di Indonesia berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berikut nama-nama yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus:

No	Nama	Masa Jabatan
1	Achmad Sulaiman,S.H	1996 s/d 1968
2	Darwin Sirin, S.H	1968
3	Amruddin Nur, S.H	1968 s/d 1972
4	L.M Silalahi, S.H	1972 s/d 1978
5	Abdullah Basri, S.H	1978 s/d 1984
6	H.P Panggabean, S.H	1984 s/d 1985
7	Soejatman, S.H	1985 s/d 1988
8	Ridwan Nasution, S.H	1988 s/d 1992
9	Soleh Hardijoto, S.H	1992 s/d 1994
10	Armen Lubis, S.H	1994 s/d 1995
11	Amir Syafaruddin Harahap, S.H	1995 s/d 1997
12	Djazuli Pranoto, S.H	1997
13	Moestofa Mochammad, S.H	1997 s/d 2001
14	Untung Harjadi, S.H	2001 s/d 2002
15	H.R Nachrowi, S.H	2002 s/d 2003
16	H. Sugeng Achmad Yudhi, S.H	2003 s/d 2005
17	H. Muh. Daming Sunusi,S.H.,M.H	2005 s/d 2006
18	Nasaruddin Tappo, S.H	2006 s/d 2008
19	H. Moch. Hatta,S.H.,M.H	2008 s/d 2010

No	Nama	Masa Jabatan
20	Dr. H. Ridwan Mansyur,S.H.,MH.M	2010 s/d 2012
21	H. Ali Makki, S.H.,M.H	April 2012 s/d November 2013
22	H. Ade Komarudin, S.H.,M.Hum	November 2013 s/d Februari 2015
23	H. Sugeng Hiyanto,S.H.,M.H	Februari 2015 s/d Juni 2016
24	H. Ahmad Ardianda Patria,S.H.,M.Hum	Juni 2016 s/d Desember 2017
25	Dr. Djaniko M.H Girsang,S.H.,M.Hum	Desember 2017 s/d Agustus 2018
26	Bongbongan Silaban,S.H.,LLM	Agustus 2018 s/d Juli 2021
27	Abdul Azis,S.H.,M.H	Juli 2021 s/d April 2022
28	Surachmat,S.H.,M.H	April 2022 s/d Januari 2023
29	Dadi Rachmadi,S.H.,M.H	Januari 2023 s/d April 2024
30	Dju Johnson Mira Mangngi,SH.,M.H	April 2024 - November 2024
31	Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum	November 2024 - November 2025
32	DR. I Nyoman Wiguna,S.H.,M.H	November 2025 -Sekarang

Tabel 1. Nama-nama Ketua Pengadilan Negeri Palembang

## B. WILAYAH YURIDIKSI

Pengadilan Negeri Palembang membawahi wilayah hukum Kota Palembang, meliputi 18 Kecamatan dan 107 Kelurahan. Antara lain:

1	Kecamatan Ilir Timur I, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Bukit Baru, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kelurahan 26 Ilir D. I, Kelurahan Lorok Pakjo, Kelurahan Siring Agung, Kelurahan Bukit Lama;
2	Kecamatan Ilir Barat II, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 27 Ilir, Kelurahan 28 Ilir, Kelurahan 29 Ilir, Kelurahan 30 Ilir, Kelurahan 32 Ilir, Kelurahan 35 Ilir;
3	Kecamatan Ilir Timur I, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 18 Ilir, Kelurahan Sei Pangeran, Kelurahan 16 Ilir, Kelurahan 13 Ilir, Kelurahan 14 Ilir, Kelurahan 15 Ilir, Kelurahan 17 Ilir, Kelurahan Kepandean Baru, Kelurahan 20 Ilir I, Kelurahan 20 Ilir IV, Kelurahan 20 Ilir III;
4	Kecamatan Ilir Timur II, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 10 Ilir, Kelurahan Duku, Kelurahan Kuto Batu, Kelurahan Lawang Kidul, Kelurahan Sungai Buah, Kelurahan 11 Ilir, Kelurahan 9 Ilir, Kelurahan 8 Ilir, Kelurahan 5 Ilir, Kelurahan 3 Ilir, Kelurahan 1 Ilir, Kelurahan 2 Ilir;
5	Kecamatan Ilir Timur III, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 8 Ilir, Kelurahan 9 Ilir, Kelurahan 10 Ilir, Kelurahan 11 ilir, Kelurahan Kuto Batu, Kelurahan Duku;

6	Kecamatan Bukit Kecil, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 22 Ilir, Kelurahan 23 Ilir, Kelurahan 24 Ilir, Kelurahan 26 Ilir, Kelurahan 26 Ilir D1;
7	Kecamatan Kemuning, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 20 Ilir II, Kelurahan Ario Kemuning, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Sekip Jaya, Kelurahan Talang Aman, Kelurahan Pipareja;
8	Kecamatan Sukarami, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Kebun Bunga, Kelurahan Suka Bangun, Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Talang Betutu;
9	Kecamatan Sako, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Sialang, Kelurahan Sako, Kelurahan Sako Baru, Kelurahan Sukamaju;
10	Kecamatan Kalidoni, yang terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Bukit Sangkal, Kelurahan Kalidoni, Kelurahan Sei Lais, Kelurahan Sei Selayur, Kelurahan Sei Selincah;
11	Kecamatan Seberang Ulu I, terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 1 Ulu, Kelurahan 2 Ulu, Kelurahan 3-4 Ulu, Kelurahan 5 Ulu, Kelurahan 7 Ulu;
12	Kecamatan Seberang Ulu II, terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Sentosa, Kelurahan 11 Ulu, Kelurahan 12 Ulu, Kelurahan 13 Ulu, Kelurahan 14 Ulu, Kelurahan 16 Ulu, Kelurahan Tangga Takat, Kelurahan Sentosa;
13	Kecamatan Gandus, terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 36 Ilir, Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Gandus, Kelurahan Karang Jaya, Kelurahan Pulo Kerto;
14	Kecamatan Sematang Borang, terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Karya Mulya, Kelurahan Lebung Gajah, Kelurahan Suka Mulya, Kelurahan Srimulya;
15	Kecamatan Alang Alang Lebar, terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Srijaya, Kelurahan Alang Alang Lebar, Kelurahan Karya Baru, Kelurahan Talang Kelapa;
16	Kecamatan Plaju, terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Plaju Ulu, Kelurahan Plaju Darat, Kelurahan Bagus Kuning, Kelurahan Komperta, Kelurahan Plaju Ilir, Kelurahan Talang Buruk, Kelurahan Talang Putri;
17	Kecamatan Kertapati, terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan Kemang Agung, Kelurahan Kemas Rindo, Kelurahan Kertapati, Kelurahan Ogan Baru, Kelurahan Karya Jaya, Kelurahan Keramasan;
18	Kecamatan Jakabaring, terdiri dari beberapa Kelurahan, yaitu: Kelurahan 8 Ulu, Kelurahan 9-10 Ulu, Kelurahan 15 Ulu, Kelurahan Silaberanti, Kelurahan Tuan Kentang

Tabel 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Palembang

# **VISI, MISI DAN RENCANA STRATEGIS**

# VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

## Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang. Visi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang yang Agung”**

## Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sebagai berikut :

- 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan**
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Bagan 1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Palembang

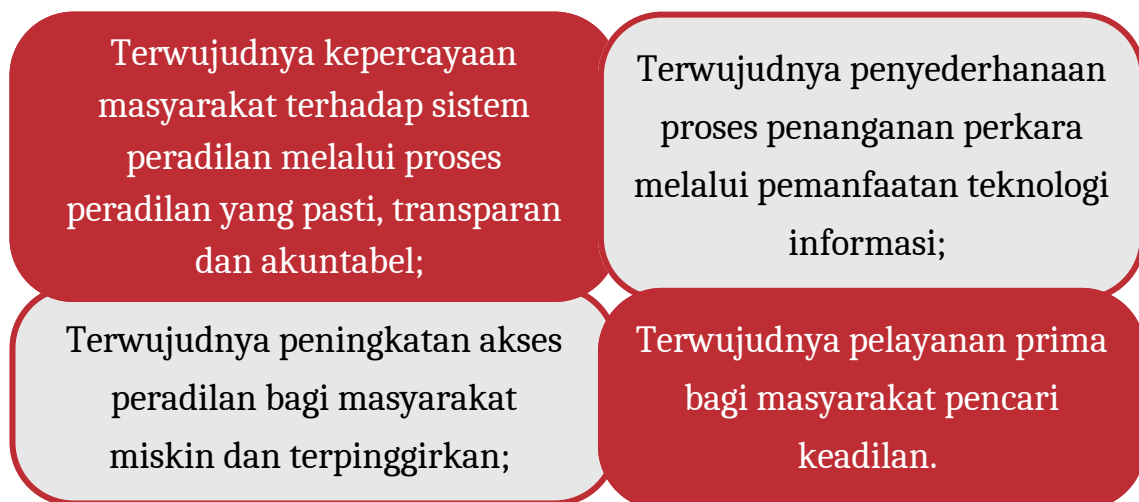
## RENCANA STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas perlu adanya suatu perencanaan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan jaman, kualitas hukum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin tinggi dan kompleks. Sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran atau variabel yang dapat mempengaruhi pencapaian *goal setting* Pengadilan Negeri Palembang di tahun ke-lima Rencana strategis 2025-2029.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Penyusunan Renstra merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis Pengadilan Negeri Palembang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Perencanaan strategis dimulai dengan tujuan strategis yang hendak dicapai.

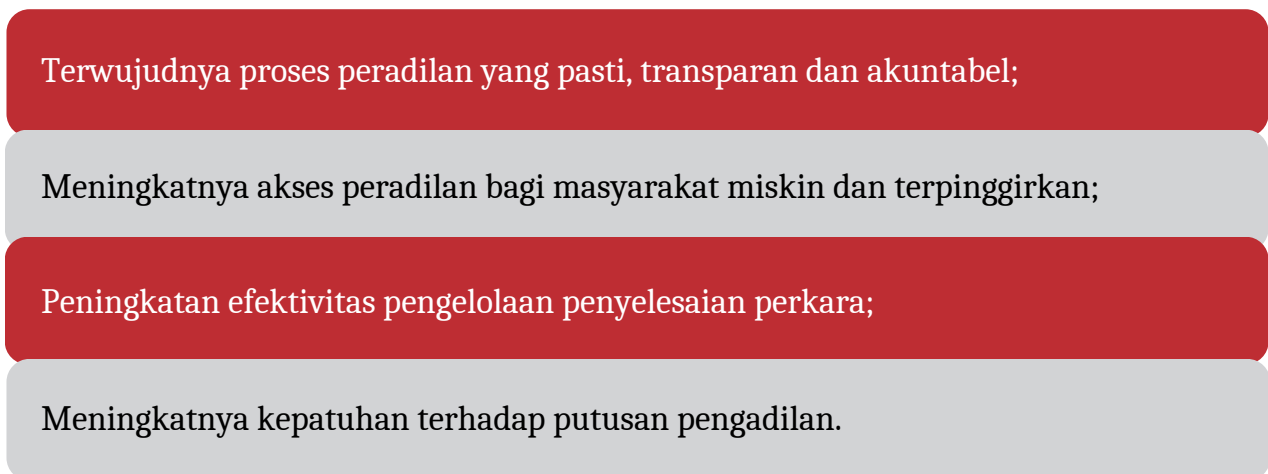
Penetapan **tujuan** disesuaikan dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, sebagai berikut:



Bagan 2 Tujuan Pengadilan Negeri Palembang

Dengan telah ditetapkan tujuan, maka ditentukanlah sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran tersebut merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun (2025-2029).

**Sasaran Strategis** yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus adalah sebagai berikut:



Bagan 3. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Palembang

**PROFIL  
KETUA & WAKIL KETUA  
PENGADILAN NEGERI  
PALEMBANG**

## A. KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

### BIODATA DIRI



DR. I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H

NIP.197012201996031002

Denpasar, 20 Desember 1970

Pembina Utama Madya (IV/d)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Strata-1 (S1)

S1 Hukum Universitas Udayana

Magister (S2)

S2 Hukum Universitas Tanjungpura

Doktor (S3)

S3 Universitas Airlangga

### RIWAYAT JABATAN

Staf Pengadilan Negeri Semarapura

Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Amlapura

Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Singkawang

Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bojonegoro

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok

Ketua Pengadilan Negeri Praya

Ketua Pengadilan Negeri Tuban

Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari

Ketua Pengadilan Negeri Kendari

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Tabel 3. Profil Ketua Pengadilan Negeri Palembang

## B. WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

### BIODATA DIRI



FAUZI ISRA,S.H.,M.H

NIP. 197101011993031005

Padang Pariaman, 1 Januari 1971

Pembina Utama Muda (IV/c)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Strata-1 (S1)

S1 Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Magister (S2)

S2 Hukum Pidana UMI Makassar

### RIWAYAT JABATAN

CPNS Departemen Kehakiman Instansi Luar

Staf Pengadilan Negeri Pariaman

Calon Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang

Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Solok

Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotamobagu

Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Limboto

Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Dumai

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Painan

Ketua Pengadilan Negeri Painan

Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu

Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Tabel 4. Profil Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang

**PROFIL HAKIM**  
**PENGADILAN NEGERI**  
**PALEMBANG**

# PROFIL HAKIM **KARIR**

**FATIMAH,S.H.,M.H**



NIP. 197102051996032002

Palembang, 05 Februari 1971

Pembina Utama Madya (IV/d)

**ZULKIFLI,S.H.,M.H**



NIP. 196608091996031002

Bukittinggi, 09 Agustus 1966

Pembina Utama Madya (IV/d)

**AGUS RAHARDJO,S.H**



NIP. 197008181996031002

Semarang, 18 Agustus 1970

Pembina Utama Madya (IV/d)

**AHMAD SAMUAR,S.H.,M.H**



NIP.196903191996031002

Palembang, 19 Maret 1969

Pembina Utama Madya (IV/d)

**AFRIZAL HADY,S.H.,M.H**



NIP. 196905231996031002

Pasaman Barat, 23 Mei 1969

Pembina Utama Madya (IV/d)

**AGUNG CIPTOADI,S.H.,M.H**



NIP. 196811131996031001

Pasuruan, 13 November 1968

Pembina Utama Madya (IV/d)

**ADE SUMITRA.H,S.H.,M.HUM**



NIP. 197406071999031002

Palembang, 07 Juni 1974

Pembina Utama Muda (IV/c)

**DR RIMDAN,S.H.,M.H**



NIP. 197302011993031003

Bengkulu, 1 Februari 1973

Pembina Utama Muda (IV/c)

**KRISTANTO S. HAMONANGAN  
SIANIPAR, S.H., M.H**



NIP. 197403241999031003

Banjarmasin, 24 Maret 1974

Pembina Utama Muda (IV/c)

# PROFIL HAKIM **KARIR**

**BUDIMAN SITORUS,S.H.,M.H**



NIP. 196402161987031005

Medan, 16 Februari 1964

Pembina Utama Muda (IV/c)

**NOOR ICHWAN ICHLAS RIA  
ADHA,S.H.,M.H**



NIP. 196803041992031004

Jakarta Barat, 04 Maret 1968

Pembina Utama Muda (IV/c)

**PARMATONI,S.H.,M.H**



NIP. 196412191996031001

Medan,19 Desember 1964

Pembina Utama Madya (IV/d)

**MASRIATI,S.H.,M.H**



NIP. 197302031992032003

Bandar Lampung, 03 Februari 1973

Pembina Utama Muda (IV/c)

**IDI IL AMIN,S.H.,M.H**



NIP. 197508092000121002

Mandailing Natal, 09 Agustus 1975

Pembina Tingkat I (IV/b)

**SAMUEL GINTING,S.H.,M.H**



NIP. 197502262000121001

Deli Serdang,26 Februari 1975

Pembina Utama Muda(IV/c)

**CORRY OKTARINA,S.H**



NIP. 197610202000122001

Palembang, 20 Oktober 1976

Pembina Tingkat I (IV/b)

**PITRIADI,S.H.,M.H**



NIP. 197609142001121002

Deli Serdang, 14 September 1976

Pembina Tingkat I (IV/b)

**EDUWARD,S.H.,M.H**



NIP. 197704302001121002

Medan, 30 April 1977

Pembina Tingkat I (IV/b)

# PROFIL HAKIM KARIR

**PATTI ARIMBI,S.H.,M.H**



NIP. 197804032002122004

Palembang, 03 April 1978

Pembina Tingkat I (IV/b)

**CHANDRA GAUTAMA,S.H.,M.H**



NIP. 197406272002121003

Palembang, 27 Juni 1974

Pembina Tingkat I (IV/b)

**TRI HANDAYANI,S.H.,M.H**



NIP. 197903162002122003

Palembang, 16 Maret 1979

Pembina Tingkat I (IV/b)

**ROMI SINATRA,S.H.,M.H**



NIP. 197705272002121005

Medan, 27 Mei 1977

Pembina Tingkat I (IV/b)

**OLOAN HUTABARAT,S.H.,M.H**



NIP. 198201052003121001

Jakarta Pusat, 05 Januari 1982

Pembina Tingkat I (IV/b)

**PARULIAN MANIKS.H.,M.H**



NIP. 198012242003121001

Tangkit Serdang, 24 Desember 1980

Pembina Tingkat I (IV/b)

**SANGKOT L.TOBING,S.H.,M.H**



NIP. 197901192003121001

Tanjungbalai, 19 Januari 1979

Pembina Tingkat I (IV/b)

**DR.HENDRI AGUSTIAN,S.H.,M.H**



NIP. 197508012005021001

Baturaja,01 Agustus 1975

Pembina Tingkat I (IV/b)

Gambar 1. Profil Hakim Karir Pengadilan Negeri Palembang

# PROFIL HAKIM AD HOC TIPIKOR

WASLAM MAKHSID,S.H.,M.H



NI. 3302091306750002

Banyumas, 13 Juni 1975

Tanpa Golongan (-)

ISKANDAR HARUN,S.H.,M.H



NI. 1671080912650008

Palangkaraya, 09 Desember 1965

Tanpa Golongan (-)

ARDIAN ANGGAS,H.,M.H



NI. 1871060106800014

Bandar Lampung, 01 Juni 1980

Tanpa Golongan (-)

KHOIRI AHMADI,S.H.,M.H



NI. 3603220704680001

Klaten, 07 April 1968

Tanpa Golongan (-)

H. WAHYU AS,S.T.,S.H.,M.H



NIP. 198008232006041003

Lubuk Linggau, 23 Agustus 1980

Penata Tingkat I (III/d)

Gambar 2. Profil Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Palembang

# PROFIL HAKIM AD HOC PHI

**DR.HARYANTO,S.H.,M.H**



NI. 1981111202201602040

Lahat, 12 November 1981

Tanpa Golongan (-)

**SARJONO,S.H.,M.H**



NI. 3174010903740008

Boyolali, 09 Maret 1974

Tanpa Golongan (-)

**AGUS TRIAWAN,S.H.,M.H**



NI. 1671092106160006

Banjarnegara, 11 Agustus 1986

Tanpa Golongan (-)

**TARSIDI,S.H.,M.H**



NI. 3216020507760008

Subang, 05 Juli 1976

Tanpa Golongan (-)

**THOBARI,S.H.,M.H**



NI. 1671131708640005

Palembang, 17 Agustus 1964

Tanpa Golongan (-)

**AHMAD BAYANI,S.H.,M.H**



NI. 1671100101660009

OKU Selatan, 01 Januari 1966

Tanpa Golongan (-)

**K.M RUSDI,S.E.,M.H**



NI. 1671061012650010

Palembang, 10 Desember 1965

Tanpa Golongan (-)

Gambar 3. Profil Hakim Ad Hoc PHI Pengadilan Negeri Palembang

**PROFIL  
PANITERA & SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI  
PALEMBANG**

## A. PANITERA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

### BIODATA DIRI



Dr., SUMARGI, S.H.,M.H.  
NIP. 197107071991031005  
Surabaya, 07 Juli 1971  
Pembina Tingkat I (IV/b)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar	MI Raden Fatah SDN Sememi I
SLTP/SEDERAJAT	Bina Putra
SLTA/SEDERAJAT	Sejahtera
Strata-1 (S1)	S1 Ilmu Hukum Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto
Magister (S2)	S2 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Doktor (S3)	S3 Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

### RIWAYAT JABATAN

Staf Pengadilan Negeri Mojokerto  
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jombang  
Widyaiswara Ahli Pertama Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan  
Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto  
Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Mojokerto  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto  
Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ngawi  
Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tuban  
Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi  
Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman  
Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Palembang

Tabel 5. Profil Panitera Pengadilan Negeri Palembang

## B. SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

BIODATA DIRI	
	<p>NAIN MEITULU, S.H</p> <p>NIP. 197005091992031002</p> <p>Palembang, 09 Mei 1970</p> <p>Pembina Tingkat I (IV/b)</p>
RIWAYAT PENDIDIKAN	
Sekolah Dasar	SD Negeri 1 Kayuagung OKI
SLTP/SEDERAJAT	SMP NEGERI 16 PALEMBANG
SLTA/SEDERAJAT	SMAN 4 Palembang
Strata-1 (S1)	S1 Ilmu Hukum Universitas Taman Siswa Palembang
RIWAYAT JABATAN	
CPNS Departemen Kehakiman Instansi Luar	
PNS Departemen Kehakiman Instansi Luar	
Kepala Urusan Pengadilan Negeri Baturaja	
Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja	
Kepala Subbagian Keuangan Pengadilan Negeri Palembang	
Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan Pengadilan Negeri Palembang	
Kepala Bagian Umum Pengadilan Negeri Palembang	
Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Palembang	
Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang	

Tabel 6. Profil Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang

# **PERISTIWA PENTING 2025**

## JANUARI



Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah dilaksanakan Acara Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja seluruh Jajaran Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Bapak Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum

## FEBRUARI



Acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 atas Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2024, diadakan di gedung Mahkamah Agung RI

## MARET



Sebagai wujud kesungguhan dan komitmen untuk terus mengupayakan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus menyelenggarakan Public Campaign

## APRIL



Puncak Peringatan HUT KE-72 IKAHI Tahun 2025. Acara dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Bapak Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum didampingi Bapak Fauzi Isra, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Dharmayukti Kartini Cabang Palembang dan seluruh anggota IKAHI Cabang Palembang

## MEI



Bertempat di halaman Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bapak Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Upacara diikuti oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Palembang

## JUNI



Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dari Bapak M.Teguh,S.E.,S.H.,M.H kepada Bapak Dr. Sumargi,S.H.,M.H. Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan dilakukan langsung Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Bapak Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum

## JULI



Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah dilaksanakan Sosialisasi Eksternal Penerapan sistem manajemen anti penyuaan (SMAP) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

## AGUSTUS



Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI Ke-80 Tahun 2025 Bapak Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

## SEPTEMBER



Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bapak Alimron Dwi Putra, S.E sebagai Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bapak H. M Afiudin, S.H., M.H sebagai Panitera Muda Perdata dan Bapak Rajes Mizandi, S.H., M.H Sebagai Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Palembang

## OKTOBER



Wisuda Purnabakti Bapak H. Efiyanto D, S.H., M.H ini diikuti oleh Bapak Fauzi Isra, S.H., M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Hakim, Pejabat Struktural Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pejabat Fungsional dan segenap Aparatur Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

## NOVEMBER



Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Bapak Dr. I Nyoman Wiguna, SH, M.H Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Bapak Dr. Herdi Agusten, SH, M.Hum

## DESEMBER



Pengadilan Negeri Palembang kembali meraih Sertifikat AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) untuk kedua kalinya secara berturut-turut pada Tahun 2024 dan 2025. Capaian ini menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan pelayanan peradilan yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tabel 7. Peristiwa Penting 2025

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus merupakan salah satu Pengadilan yang berada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Palembang dan berada di bawah Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini tertulis dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, perdata. Selain itu, Pengadilan Negeri Palembang sebagai Pengadilan Khusus mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu seperti Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supremasi hukum di Indonesia khususnya di Kota Palembang, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus harus memiliki kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pencari keadilan yang merupakan stakeholder tertinggi atas Negara yang berdaulat seperti yang tertuang dalam UUD RI 1945.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sebagai Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung juga diarahkan untuk terus berinovasi menciptakan layanan teknologi dan meningkatkan digitalisasi sehingga aparatur yang dihasilkan adalah aparatur unggul dan tangguh yang mampu membawa pembaruan menuju Revolusi Industri 5.0.



Bagan 4. Fungsi Pengadilan Negeri Palembang

Sasaran dan capaian program pembaruan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya khususnya Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, antara lain dalam Pembaruan Bidang Teknis, Pembaruan Manajemen Perkara, Pembaruan Bidang Pengawasan dan Pembaruan Bidang Peningkatan Manajemen SDM Unggul dan Tangguh.

## Pembaruan Bidang Teknis

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, berusaha melakukan pembaruan di bidang teknis melalui peningkatan pengguna layanan persidangan perkara perdata secara elektronik melalui e-court sehingga mendorong terlaksananya pemanggilan secara elektronik lebih luas yang menciptakan gabungan peran antara manusia (Jurisita Pengadilan) dengan teknologi sehingga dapat mewujudkan peradilan efektif sebagaimana asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Saat ini, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus menggunakan Aplikasi terbaru versi 6.0.0.

Selain itu, e-berpadu juga menjadi salah satu cara pembaruan dalam bidang teknis yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Palembang.



Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi e-berpadu

Penerapan sistem e-berpadu yang didukung SDM yang mumpuni dan sarana prasarana memadai sehingga perluasan cakupan teknis perkara pidana secara elektronik yang penerapannya terdokumentasi secara elektronik yang memudahkan proses persidangan.

Sistem e-berpadu ini telah membangun *integrated criminal justice system* yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan negara (antar lembaga penegak hukum), kepentingan masyarakat maupun kepentingan pelaku dan korban tindak pidana.

## Pembaruan Manajemen Perkara

Sasaran pembaruan di bidang manajemen perkara adalah mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dalam hal ini wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara yang dilakukan secara berkesinambungan adalah Penguatan Fungsi Pengawasan Penyelesaian Penanganan Perkara Tepat Waktu dan Mendorong Konsistensi Putusan melalui Pembinaan dan Pemberian Informasi Penerapan Regulasi Terbaru.

## Pembaruan Bidang Pengawasan

Salah satu pengadilan yang menerapkan pengawasan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Sejak awal tahun 2025, Pengadilan mengikuti serangkaian proses pelaksanaan SMAP. Mulai dari Kick Off Pendampingan SMAP, Pembekalan SMAP Tahap I - Tahap V.

Tekad kebersamaan dalam melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan tidak berarti tantangan dan hambatan dapat diatasi dengan mudah, namun segala tantangan dan hambatan tersebut menjadi pelajaran bahwa untuk mewujudkan badan peradilan yang agung membutuhkan kerja ikhlas, pengorbanan tanpa pamrih dan sistem pengawasan yang teruji.

Pembaruan Bidang Pengawasan juga dilakukan dengan peningkatan pengawasan internal dengan pengadaan rapat berjenjang dan rapat bulanan yang dilaksanakan secara rutin. Pada minggu pertama bulan berjalan dilaksanakan Rapat Berjenjang Hakim Pengawas Bidang, Minggu kedua bulan berjalan dilaksanakan Rapat Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Minggu ketiga bulan berjalan dilaksanakan Rapat berjenjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan Minggu keempat bulan berjalan dilaksanakan Rapat Bulanan Evaluasi Kinerja oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

## Pembaruan Bidang Peningkatan SDM Unggul dan Tangguh

Pengadilan Negeri Palembang merupakan salah satu Pengadilan yang menerapkan Program AMPUH Badilum. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum.



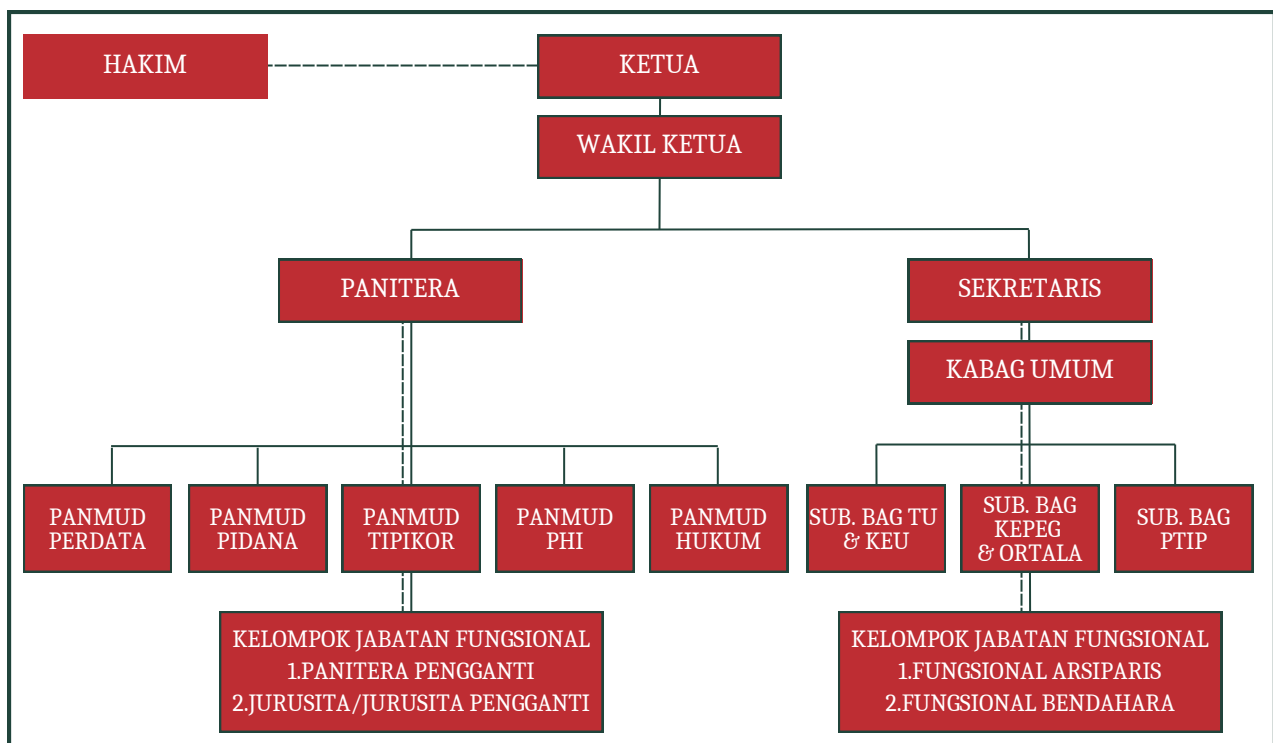
Gambar 5. Sertifikat UNGGUL

Tekad kebersamaan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Palembang dalam menerapkan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan secara prima menghasilkan Penghargaan dari Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai Pengadilan yang telah memenuhi standar AMPUH dengan predikat **UNGGUL**.

Dengan adanya kebijakan umum peradilan dan pembaruan-pembaruan di atas maka, Kinerja Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus harus dapat dipertanggung jawabkan secara formal dan perlu disusun dalam suatu Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan. Landasan hukum penyusunan laporan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku 1 pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan Surat Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.4108/SEK/OT1.6/12/2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024. Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan didampingi oleh seorang Wakil Ketua Pengadilan. Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan seorang Sekretaris yang menangani administrasi umum disuatu Pengadilan.



Bagan 5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Palembang

# **BAB II**

# **KEADAAN PERKARA**

## A. KEADAAN PERKARA

Keadaan Perkara pada Pengadilan Palembang Kelas IA Khusus setiap tahun selalu berubah dan terus meningkat. Kondisi tersebut terhitung sampai dengan bulan Desember 2025 dengan rincian sesuai tabel berikut:

### 1 Keadaan Perkara di Tingkat Pertama

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palembang adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, perlu dilakukan penghitungan keadaan perkara pada Pengadilan Palembang Kelas IA Khusus pada Tingkat Pertama sampai dengan bulan Desember 2025.

#### KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA DAN PIDANA KHUSUS

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk	Cabut	Putus	Sisa Tahun 2025
1	Pidana Biasa	244	1.517	-	1.470	302
2	Pidana Singkat	-	-	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	52	-	52	-
4	Pelanggaran Lalu Lintas	-	10.088	-	10.088	-
5	Pra Peradilan	2	28	-	29	1
6	Pidana Anak	-	38	-	38	-
7	Tipikor	41	95	-	101	35
8	Perikanan	-	4	-	4	-

Tabel 8. Keadaan Perkara Pidana Biasa dan Pidana Khusus

#### KEADAAN PERKARA PERDATA DAN PERDATA KHUSUS

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk	Cabut	Putus	Sisa Tahun 2025
1	Perdata Gugatan	115	350	69	266	130
2	Perdata Permohonan	6	427	38	386	9
3	Gugatan Sederhana	13	174	67	99	21
4	Perlawanan ( <i>Derden Verzet</i> )	5	22	0	13	14
5	Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)	22	128	11	108	42

Tabel 9. Keadaan Perkara Perdata Biasa dan Perdata Khusus

## 2 Keadaan Perkara di Tingkat Banding

Laporan keadaan perkara Tingkat banding adalah laporan perkara yang dimohonkan banding dan dilaporkan sejak perkara diputus, diajukannya permohonan banding sampai dengan pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Palembang. Keadaan Perkara pada Pengadilan Palembang Kelas IA Khusus pada Tingkat Banding sampai dengan bulan Desember 2025, sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2024	Masuk	Jumlah Beban	Cabut	Putus 2025	Sisa Tahun 2025
1	Perdata	3	87	90	3	76	6
2	Pidana Biasa	10	93	-	8	86	3
3	Pidana Anak	-	4	-	-	3	1
4	Tipikor	6	36	-	9	33	-

Tabel 10. Keadaan Perkara Tingkat Banding

## 3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Jika pihak berperkara (yang dikalahkan atau dimenangkan) berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang disampaikan kepadanya tidak memenuhi rasa keadilan atau ada kesalahan dalam menerapkan hukum, maka pencari keadilan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Palembang dalam tenggat waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan Banding diterimanya. Keadaan Perkara pada Pengadilan Palembang Kelas IA Khusus pada Tingkat Kasasi sampai dengan bulan Desember 2024, sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi Tahun 2025	Jumlah Perkara Kasasi yang Putus Tahun 2025
1	Pidana	55	33
2	Pidana Khusus Tipikor	26	25
3	Perdata	54	44
4	Perdata Khusus PHI	67	38

Tabel 11. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

## 4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender, dalam hal:

- Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu, adalah sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tetap diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, adalah sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara.
- Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu keliruan yang nyata, adalah sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.

Keadaan Perkara pada Pengadilan Palembang Kelas IA Khusus pada Tingkat Peninjauan Kembali sampai dengan bulan Desember 2025, sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang Mengajukan PK Tahun 2025	Jumlah Perkara PK yang Putus Tahun 2025
1	Pidana	45	23
2	Pidana Khusus Tipikor	10	9
3	Perdata	17	19
4	Perdata Khusus PHI	-	-

Tabel 12. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

## B. PENYELESAIAN PERKARA

### 1 Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus merupakan sisa perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2024 dan kemudian diputus/diselesaikan pada tahun 2025.

No	Jenis Perkara	Jumlah perkara Putus Th.2025	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Persentase Penyelesaian Sisa Perkara
1	Pidana	1.470	1.470	100%
2	Pidana Khusus Tipikor	101	101	100%
3	Perdata	941	941	100%
4	Perdata Khusus PHI	108	108	100%

Tabel 13. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

### 2 Jumlah Perkara Tingkat Banding yang diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara tingkat banding yang diputus dan disajikan adalah data perkara yang masuk, diputus dan diselesaikan di tahun 2025, sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2025	Jumlah Perkara Putus Tepat Waktu	Jumlah Perkara Putus Tidak Tepat Waktu	Rasio Penyelesaian Perkara Putus Tepat Waktu
1	Pidana	86	86	-	100%
2	Pidana Anak	3	3	-	100%
3	Pidana Khusus Tipikor	33	33	-	100%
4	Perdata	76	76	-	100%

Tabel 14. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Tepat Waktu

### 3 Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah perkara yang disajikan adalah data perkara diputus dan diselesaikan di tahun 2025 yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Putus Tahun 2025	Jumlah Perkara yang Putus Tahun 2025 yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum					
			Banding		Kasasi		PK	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pidana	1.470	1.377	93,67%	1.415	96,26%	1.468	99,86%
2	Pidana Khusus Tipikor	104	65	64,36%	75	74,26%	98	97,03%
3	Perdata	279	192	68,82%	75	74,26%	98	97,03%
4	Perdata Khusus PHI	150	-	-	53	35,03%	-	-

Tabel 15. Jumlah Sisa Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

### 4 Jumlah Perkara yang Berhasil melalui Restoratif

Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan melalui Restoratif pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada Tahun 2025, sebagai berikut:

Jumlah Perkara yang Berhasil melalui Restoratif Tahun 2025	Status Keberhasilan Restoratif	
	Berhasil	Tidak Berhasil
2	2	-

Tabel 16. Jumlah Perkara yang Berhasil Restoratif

### 5 Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi

Jumlah Perkara Pidana Anak yang dialihkan ke Diversi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada Tahun 2025, sebagai berikut:

Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi Tahun 2025	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
240	11	217	1	11

Tabel 17. Jumlah Perkara yang Berhasil Melalui Mediasi

## 6 Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2025	Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diversi Tahun 2025	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
38	7	7	13	-	-

Tabel 18. Jumlah Perkara yang Berhasil Melalui Diversi

## 7 Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court

Jumlah Perkara yang Menggunakan E-court Tahun 2025	Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Tahun 2025	Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan e-Court Tahun 2025
Perdata	941	973
PHI	108	128

Tabel 19. Jumlah Perkara yang Menggunakan e-Court

## 8 Perkara Pidana yang Menggunakan e-Berpadu

Jumlah Perkara yang Menggunakan e-Berpadu Tahun 2025	Jumlah Perkara Pidana yang Diputus Tahun 2025	Jumlah Perkara Perdata yang Menggunakan e-Berpadu Tahun 2025
Pidana	1.555	1.555
Tipikor	95	95

Tabel 20. Jumlah Perkara yang Menggunakan e-Berpadu

## C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

### 1 Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Maka, Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan sosialisasi secara langsung maupun *online* yaitu melalui Website dan Sosial Media resmi Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Untuk Lembaga Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Palembang pada Tahun Anggaran 2025 adalah LEMBAGA BANTUAN HUKUM SUMATERA SELATAN. Berikut Jumlah Anggaran Posbakum, Realisasi Anggaran Posbakum dan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum pada Tahun 2025.

Jumlah Anggaran Posbakum	Realisasi Anggaran Posbakum		Jumlah Layanan
	(Rp)	%	
Rp.28.000.000	Rp.2.333.333	100%	267

Tabel 18. Jumlah Anggaran dan Layanan Hukum Posbakum

## 2 Sidang Keliling

Sidang Keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2025 tidak ada program sidang keliling.

## 3 Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Salah satu pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu adalah layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo). Itu artinya, Negara yang menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Perkara Prodeo pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada Tahun 2025 berikut ini.

Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan Tahun 2025	Jumlah Anggaran Prodeo (Rp)	Realisasi Anggaran Prodeo	
		(Rp)	%
9	Rp 1.325.000	Rp 1.325.000	14,94%

Tabel 19. Jumlah Perkara Prodeo Diselesaikan

# **BAB III**

# **SUMBER DAYA**

# **MANUSIA**

# KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dan tidak dapat dilepaskan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Pada hakikatnya, seluruh aparatur Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus bergerak bersama-sama untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

## 1 Komposisi SDM berdasarkan Jabatan

Jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Palembang per 29 Desember 2025, sebanyak 124 Orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Ketua	1 Orang
2	Wakil Ketua	1 Orang
3	Hakim Karier	26 Orang
4	Hakim Ad Hoc Tipikor	5 Orang
5	Hakim Ad Hoc PHI	7 Orang
6	Panitera	1 Orang
7	Panitera Muda Perdata	1 Orang
8	Panitera Muda Pidana	1 Orang
9	Panitera Muda Tipikor	1 Orang
10	Panitera Muda PHI	1 Orang
11	Panitera Muda Hukum	1 Orang
12	Panitera Pengganti	21 Orang
13	Jurusita \Jurusita Pengganti	15 Orang
14	Sekretaris	1 Orang
15	Kepala Bagian Umum	1 Orang
16	Kepala Sub Bagian PTIP	1 Orang
17	Kepala Sub Bagian Kepeg dan ORTALA	1 Orang
18	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	-
19	Fungsional	4 Orang
20	Pelaksana Kepaniteraan	13 Orang
21	Pelaksana Kesekretariatan	7 Orang
22	Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	14 Orang
<b>Total</b>		<b>124 Orang</b>

Tabel 20. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan

## 2 Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Satuan Kerja	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I
1	Pengadilan Negeri Palembang	41	47	11	-

Tabel 21. Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Kepangkatan/Golongan

## 3 Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S-3 (Doktoral)	5
2	S-2 (Magister)	53
3	S-1 (Sarjana)	41
4	D-3 (Ahli Madya)	12
5	SMA	13
<b>Total</b>		<b>124</b>

Tabel 22. Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan

## A. MUTASI

### 1 Mutasi Hakim dan Pegawai

No	Satuan Kerja	Jabatan	Jumlah Mutasi Masuk (Orang)	Jumlah Mutasi keluar (Orang)
1	Pengadilan Negeri Palembang	Hakim Karir	9	3
		Hakim Ad Hoc	-	-
		Struktural Non Hakim	3	2
		Fungsional	2	-
		Pelaksana	1	2

Tabel 23. Mutasi Masuk Hakim dan Pegawai

## B.PROMOSI

### 2 Promosi Hakim dan Pegawai

No	Satuan Kerja	Jabatan	Jumlah Promosi Masuk (Orang)	Jumlah Promosi keluar (Orang)
1	Pengadilan Negeri Palembang	Hakim Karir	1	1
		Hakim Ad Hoc	-	-
		Struktural Non Hakim	3	2
		Fungsional	-	-
		Pelaksana	-	-

Tabel 24. Mutasi Keluar Hakim dan Pegawai

## C.PENSIUN

### 3 Pensiun Hakim dan Pegawai

No	Satuan Kerja	Jumlah Hakim dan Pegawai yang Pensiun pada tahun 2025
1	Pengadilan Negeri Palembang	5

Tabel 27. Pensiun Hakim dan Pegawai

## D. DIKLAT

Daftar Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tahun 2024, yaitu:

No	Satuan Kerja	Jumlah SDM yang mengikuti Diklat Teknis	Jumlah SDM yang Mengikuti Diklat Non Teknis
1	Pengadilan Negeri Palembang	48	32

Tabel 28. Pendidikan dan Pelatihan Hakim dan Pegawai

# **BAB IV**

## **PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

## A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas Antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Penyusunan Laporan Keuangan Kantor pada Pengadilan Negeri Palembang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan.

Pengelolaan Keuangan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus meliputi:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal;
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang (Non Operasional dan Operasional).
3. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berikut adalah matrik pengelolaan keuangan untuk Tahun Anggaran 2025.

### 1 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (01)

Satker		Pagu	Rupiah	Presentase	Sisa
Pengadilan Negeri Palembang	Belanja Pegawai	Rp.24.138.579.000	Rp.23.977.245.094	99,33%	Rp.161.333.907
	Belanja Barang	Rp.2.624.549.000	Rp.2.367.077.435	90,19%	Rp.257.471.565
	Belanja Modal	Rp.25.000.002.000	Rp.24.920.834.003	99,68%	Rp.79.167.997

Tabel 29. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01

### 2 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA (03)

Satker	Pagu	Rupiah	Presentase	Sisa
Pengadilan Negeri Palembang	Rp 533.721.000	Rp 494.049.026	92,57%	Rp.39.671.974

Tabel 30. Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03

### 3 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Satker	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Rp)						
	425122	425131	425231	425232	425233	425239	425151
Pengadilan Negeri Palembang	-	Rp. 89.657.000	Rp. 10.870.000	Rp. 460.000	Rp. 42.665.000	Rp. 102.668.500	Rp. 16.048.248

Tabel 31. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

### 1 Tanah

No	Satuan Kerja	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Total
1	Pengadilan Negeri Palembang	5	2	7

Tabel 32. Data Tanah

### 2 Tanah dan Gedung

No	Satuan Kerja	Nama Aset	Sudah PSP		Belum PSP	
			Luas (m2)	Nilai (Rp)	Luas (m2)	Nilai (Rp)
1	Pengadilan Negeri Palembang	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.964	120.809.231.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.008	914.256.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	350	2.531.440.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	780	3.011.760.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1500	5.712.000.000	-	-

No	Satuan Kerja	Nama Aset	Sudah PSP		Belum PSP	
			Luas (m2)	Nilai (Rp)	Luas (m2)	Nilai (Rp)
1	Pengadilan Negeri Palembang	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	464	626.864.000	-	-
		Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	252	610.837.000	-	-
		Bangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus	3150	7.908.939.000	-	-
		Rumah negara golongan II tipe A permanen	80	184.528.000	-	-
		Rumah negara golongan II tipe A permanen	70	42.689.000	-	-
		Rumah negara golongan II tipe A permanen	60	124.409.000	-	-
		Rumah negara golongan II tipe A permanen	60	124.409.000	-	-
		Rumah negara golongan II tipe A permanen	60	124.409.000	-	-
		Rumah negara golongan II tipe A permanen	60	124.409.000	-	-
		Rumah negara golongan II tipe A permanen	60	36.591.000	-	-
		Rumah negara golongan II tipe A permanen	60	91.477.000	-	-

Tabel 33. Tanah dan Gedung

### 3 Kendaraan Dinas

No	Satuan Kerja	Jumlah	Sudah PSP	Belum PSP
1	Kendaraan Roda 4	6	6	-
2	Kendaraan Roda 2	8	8	-

Tabel 34. Data Kendaraan Dinas

### 4 Keadaan Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Rumah Dinas KPN	1	1	-	-
2	Rumah Dinas WKPN	1	-	-	1
3	Rumah Dinas Sekretaris	1	-	-	1
4	Rumah Dinas Hakim	8	6	-	2

Tabel 35. Data Keadaan Rumah Dinas

## 5 Sarana dan Prasarana Gedung

No	Uraian	Jumlah	Keadaan Sarana dan Prasarana
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Panitera	1	Baik
4	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	Baik
5	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	Baik
6	Ruang Kepaniteraan Tipikor	1	Baik
7	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	Baik
8	Ruang Kepaniteraan PHI	1	Baik
9	Ruang Sekretaris	1	Baik
10	Ruang Kabag Umum	1	Baik
11	Ruang Sub Bagian PTIP	1	Baik
12	Ruang Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian	1	Baik
13	Ruang Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	1	Baik
14	Ruang Tahanan Pria	1	Baik
15	Ruang Tahanan Wanita	1	Baik
16	Ruang Tahanan Anak	1	Baik
17	Ruang Laktasi	1	Baik
18	Ruang Kesehatan	2	Baik
19	Ruang Arsip	1	Baik
20	Ruang Rapat Pimpinan	1	Baik
21	Ruang Aula Pertemuan	1	Baik
22	Ruang Mediasi	1	Baik
23	Ruang Perpustakaan	1	Baik
24	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik
25	Ruang Sidang	8	Baik
26	Ruang Hakim	10	Baik

Tabel 36. Data Sarana dan Prasarana Gedung

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung terlaksananya administrasi dan pelayanan secara umum Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah mengimplementasikan berbagai dukungan teknologi, antara lain sebagai berikut:

### 1 Implementasi E-Court

E-Court Mahkamah Agung RI adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online (*e-payment*), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (*e-summons*), dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-litigation*).

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penggunaan pelayanan e-Court di Pengadilan Negeri Palembang sudah dilaksanakan sejak Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 122/KMA/SK/VII/2018 diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2018. Untuk penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2018, maka dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan tersebut mengatur tentang pendaftaran e-Court bagi pengguna non Advokat (pengguna insidentil).

Dengan adanya peraturan tersebut, maka di tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Palembang pendaftaran perkara perdata sudah seluruhnya melalui e-court. Adapun jumlah perkara yang masuk pada Tahun 2025 melalui aplikasi e-court sebanyak:

No	Uraian	Jumlah Perkara
1	Perdata Gugatan	354
2	Perdata Bantahan	18
3	Perdata Permohonan	427
4	Perdata Gugatan Sederhana	174

Tabel 37. Jumlah Perkara Masuk Melalui E-Court

Untuk mempermudah akses dan pemahaman sistem e-court, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sudah menyediakan fasilitas Pojok e-court yang berguna untuk para pencari keadilan apabila ada berkas dokumen yang belum di upload bisa memanfaatkan area tersebut untuk mengakses sistem e-court, sekaligus sebagai pembelajaran bagi para pencari keadilan untuk mendaftarkan akun dan memahami proses e-court yang di pandu oleh petugas helpdesk e-court yang ada di Loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

## 2 Implementasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan untuk memonitor kinerja aparaturnya oleh pimpinan di masing-masing satuan kerja maupun Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Mahkamah Agung RI. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah sesuai asas peradilan.

Aplikasi SIPP pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus sudah menggunakan versi terbaru, yaitu SIPP Versi 6.0.1. Pengadilan Negeri Palembang melakukan sinkronisasi ke Mahkamah Agung dan ke Pengadilan Tinggi Palembang minimal 2 kali dalam sehari dan dilakukan rutin setiap hari.

## 3 Implementasi e-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi berkas pidana antar Penegak Hukum. Penegak hukum yang dimaksud kepolisian (termasuk Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Permasalahan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Negeri Palembang juga mendapatkan Penghargaan dalam pelaksanaan penggunaan E-Berpadu



Gambar 6. Piagam Penghargaan E-Berpadu

Aplikasi e-Berpadu diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, serta telah dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 238/KMA/SK/VIII/2022 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba, Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik.

Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan penetapan izin atau persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan penetapan izin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

Berikut ini merupakan informasi mengenai jumlah berkas masuk melalui e-Berpadu di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus selama Tahun 2025.

**Berkas Masuk Perkara Pidana melalui E-berpadu Tahun 2025**

No	Jenis	Jumlah Perkara
1	Pidana Biasa	1.517
2	Pidana Anak	38
3	Pidana Cepat	52
4	Pidana Perikanan	4
5	Praperadilan	28
6	Pidana Singkat	-
7	Pidana Lalu Lintas	10.088
8	Penyitaan	2.262
9	Penggeledahan	616
10	Penahanan	1.138
11	Izin Besuk	2
12	Izin Pinjam Pakai	9
14	Diversi	7

Tabel 38. Berkas Masuk Perkara Pidana melalui E-Berpadu

### **Berkas Masuk Perkara Tipikor melalui E-berpadu Tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tipikor	95
2	Penyitaan	151
3	Penggeledahan	20
4	Penahanan	95
5	Izin Besuk	7
6	Izin Pinjam Pakai	-

Tabel 39. Berkas Masuk Perkara Tipikor melalui E-Berpadu

**BAB V**  
**PENINGKATAN**  
**PELAYANAN**  
**PUBLIK**

## A. AKREDITASI PENJAMIN MUTU

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar ISO 9001:2015, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan pembangunan Zona Integritas.

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinal Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se-Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh pengadilan negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Namun, berdasarkan asesmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, program Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan perlu ditingkatkan sistem dan pelaksanaannya. Sehingga, dibuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi **sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH)** di lingkungan peradilan umum yang tercantum dalam **SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MA RI NOMOR 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 TENTANG PEMBERLAKUAN PROGRAM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**. Hal ini agar satuan kerja di bawah lingkungan Badan Peradilan Umum mampu memberikan jaminan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan secara profesional dan pelayanan berkualitas bagi Pengguna Pengadilan sesuai standar serta mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan Pengguna Pengadilan.

## **sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH)**

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) di lingkungan peradilan umum, menetapkan program AMPUH sebagai salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Lingkungan Peradilan Umum.

### **Sasaran AMPUH**

Sasaran sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) tidak terlepas dari sasaran yang sudah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut:

- Meningkatnya manajemen pelayanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum;
- Meningkatnya kompetensi dan integritas tenaga teknis peradilan umum;
- Meningkatnya tertib administrasi perkara kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
- Meningkatnya manajemen pelayanan di lingkungan peradilan umum.

### **Ruang Lingkup AMPUH**

Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sesuai Maklumat Pelayanan dan Standar Layanan.

### **Asesmen AMPUH**

Kegiatan asesmen sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) meliputi 3 (tiga) kegiatan asesmen secara menyeluruh sebagai berikut:

- Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP satuan kerja melalui monitoring CCTV oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- Asesmen Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- Asesmen sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) dalam bentuk kegiatan asesmen ke Pengadilan (dengan menggunakan lembar asesmen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Tahap Pelaksanaan Asesmen AMPUH, sebagai berikut:

- Tahap I Proses Awal
- Tahap II Pelaksanaan Asesmen/Penilaian AMPUH
- Tahap III Penyelesaian Laporan Hasil Asesmen (LHA) dan verifikasi oleh Tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah/ Tim Asesmen AMPUH.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada Tahun 2025 melalui **SK Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 126/KPN.W6-U1/SK.HK1.2.5/VII/2025 tentang Penunjukan TIM sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Palembang** melaksanakan AMPUH dengan maksimal untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara dan manajemen pelayanan di Pengadilan Negeri Palembang.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada Tahun 2025 sudah mengikuti dan melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan AMPUH, antara lain:

Kegiatan	Dokumentasi
<p>Rapat Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada tanggal 06 Februari 2025</p>	
<p>Pada hari Rabu tanggal 30 April 2025, bertempat di ruang Sidang Utama, telah dilaksanakan Rapat AMPUH. Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Bapak Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum didampingi Bapak Fauzi Isra, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus</p>	
<p>Rapat Pelaksanaan Kegiatan sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan tangguh (AMPUH) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus didampingi oleh Panitera dan Sekretaris serta diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada tanggal 20 Mei 2025;</p>	

Kegiatan	Dokumentasi
<p>Bapak Dr. Haryanto, S.H., M.H. didampingi oleh Plh. Panitera Bapak H Muhammad Afiudin, S.H., M.H. dan Plh. Sekretaris Bapak Junaidi, S.Psi., M.Si. beserta para Panitera Muda Dan Kepala Sub Bagian Menghadiri acara Penyerahan Penghargaan Kinerja dan Layanan Terbaik Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dan penyerahan Piala "ABHINAYA UPANGGA WISESA" pada Lingkungan Badan Peradilan Umum Tahun 2025 Secara Daring.</p>	
<p>Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah Menerima Sertifikat AMPUH (sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh) yang diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung Bapak Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus. Bapak Dr. I Nyoman Wiguna, S.H., M.H</p> <p>Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus kembali meraih Sertifikat AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) untuk kedua kalinya secara berturut-turut pada Tahun 2024 dan 2025. Capaian ini menjadi motivasi untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta menghadirkan pelayanan peradilan yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan.</p>	

Tabel 40. Rangkaian Kegiatan Program AMPUH

## B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan publik. Sistem pelayanan publik tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri melalui satu pintu. Maka untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan tersebut diperlukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sesuai dengan tugas fungsi pengadilan, yang kemudian berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibagi ke dalam 7 (Tujuh) Meja Pelayanan, yaitu:

- Pojok e-court: Melayani jenis pelayanan yang berhubungan e-court dan e-litigasi.
- Meja Pelayanan Kepaniteraan Perdata: Melayani semua jenis pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan Perkara Perdata;
- Meja Pelayanan Kepaniteraan Khusus Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI): Melayani semua jenis layanan yang berhubungan dan berkaitan dengan Perkara Hubungan Industrial;
- Meja Pelayanan Kepaniteraan Khusus Tindak Pidana Korupsi: Melayani semua jenis pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Meja Pelayanan Kepaniteraan Pidana: Melayani semua jenis pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan Perkara Pidana;
- Meja Pelayanan Kepaniteraan Hukum: Melayani semua jenis layanan bidang hukum seperti Pendaftaran Surat Kuasa, Pendaftaran CV, dll.;
- Meja Pelayanan Tata Usaha dan Keuangan: Melayani Penerimaan Surat Masuk, Penerimaan Berkas Perkara Upaya Hukum, dan lain-lain;

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 228/KPM.W6.U1/SK.OT1.1/XII/2024 tentang Penunjukan Pengawas PTSP, dilakukan penunjukan Hakim Pengawas untuk memperlancar tugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Hakim yang ditunjuk sebagai Pengawas Pelayanan tersebut di atas adalah yang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas pengawasan. Hakim Pengawas melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP minimal 2x dalam sehari dan membuat hasil laporan pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus setiap bulannya.

## C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Palembang serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Negeri Palembang, maka perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Berikut beberapa inovasi yang dibuat dan dikembangkan oleh aparatur di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

### 1 Aplikasi Arsip Internal (ARIN)

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam penyelenggaraan kearsipan. Selain itu juga pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.

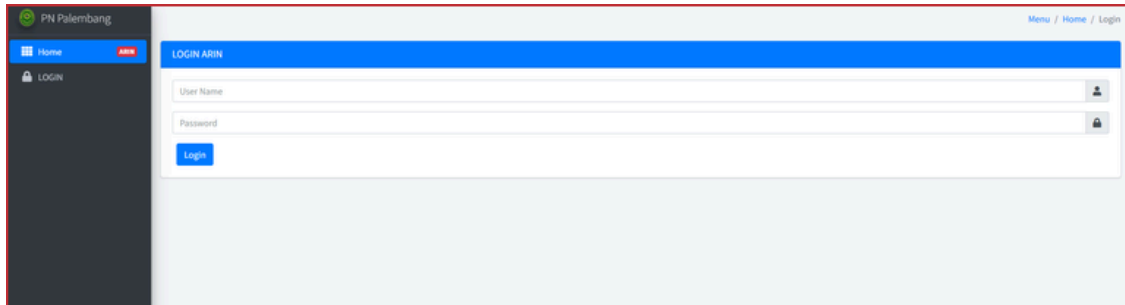


Gambar 7. Tampilan Awal ARIN

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Palembang membuat inovasi Pengelolaan arsip elektronik yang disebut ARIN (Aplikasi Arsip Internal). Dengan adanya aplikasi ini akan mendukung fungsi dan tugas melalui penciptaan arsip yang andal serta dapat digunakan, berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta mengurangi risiko dengan menjamin bahwa arsip yang tepat diciptakan untuk mempertahankan kinerja dan kontinuitas kegiatan karena aplikasi ini bisa membantu mengelola arsip dan surat kapan saja dan di mana saja.

Aplikasi Arsip Internal ini hadir untuk mengubah secara bertahap pengelolaan arsip secara manual. Karena, penggunaan arsip dalam bentuk fisik rentan terhadap kerusakan dan kehilangan. Selain itu, pengelolaan manual juga memakan waktu yang lama untuk mencari data dan membutuhkan ruang penyimpanan yang luas.

Aplikasi Arsip Internal ini dapat diakses oleh setiap operator yang sudah diberikan username dan password. Para operator juga dapat mengunggah seluruh dokumen yang penting untuk diarsipkan dan dibutuhkan oleh bagian atau sub bagian lain. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, dapat juga mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).

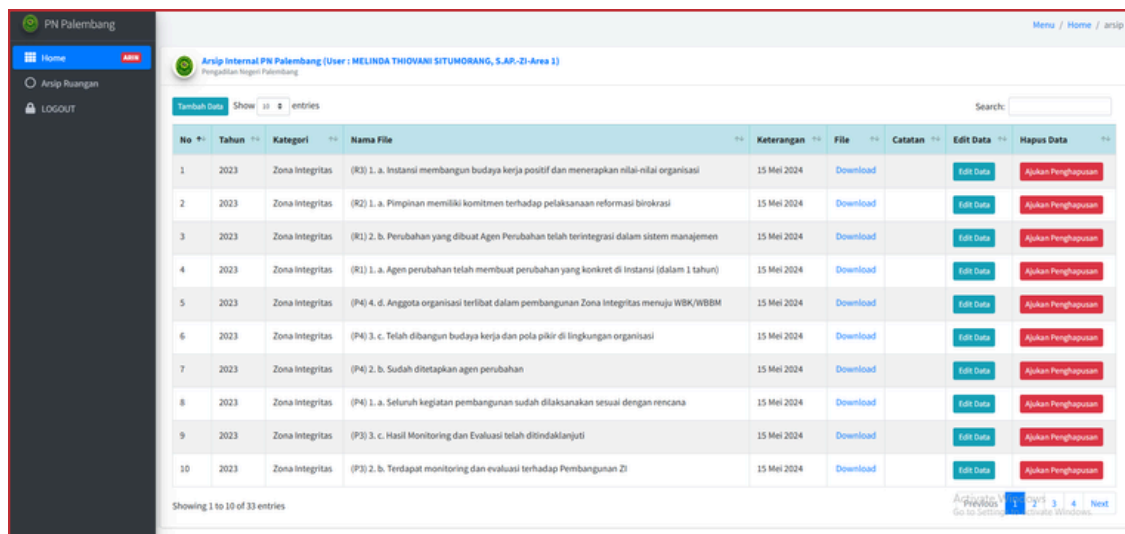


Gambar 8. Halaman Login ARIN



Gambar 9. Folder Arsip ARIN

Aplikasi arsip ini memiliki fitur-fitur yang memudahkan pengguna dalam pengelolaan dokumen seperti sistem pengindeksan dan pencarian yang mempermudah akses ke dokumen yang dibutuhkan. Aplikasi ini menggunakan server cloud untuk menyimpan data, sehingga data menjadi lebih aman, mudah dicari, dan dapat diakses dengan mudah.



Gambar 10. Tampilan daftar arsip dokumen di ARIN

## 2 Aplikasi Riset dan Magang (ARISMA)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan modernisasi sistem pelayanan pada Pengadilan Negeri Palembang. Oleh karena itu perlu dilakukan modernisasi melalui aplikasi yang menunjang sistem pelayanan yang diberi nama ARISMA (Aplikasi Riset dan Magang).



Gambar 11. Tampilan Awal ARISMA

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pendaftaran izin melakukan riset serta izin magang pada Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus yang dilakukan secara online. Aplikasi ini dapat diakses pada alamat <https://arisma.pn-palembang.go.id/>

This screenshot shows the 'Permohonan Magang' form in the ARISMA application. The form is titled 'Permohonan Magang Pada Pengadilan Negeri Palembang'. It contains several input fields: 'Nomor Surat Pengantar', 'Pembuat Permohonan Magang', 'Asal Universitas / Fakultas / Sekolah / Instansi / Organisasi', 'Nama Pemohon', 'Nomor KTP', 'Alamat Pemohon', 'Jenis Kelamin', and 'Agama'. There is also a section for 'No Telp (Wajibkan Pada WhatsApp / SMS)' and an 'Upload & Doc Permohonan (Berkas) dengan KTP Pemohon (2 File PDF, Max 3 MB)' section with a 'Choose File' button and a 'No file chosen' message. At the bottom, there are 'Simpan' and 'Batal' buttons.

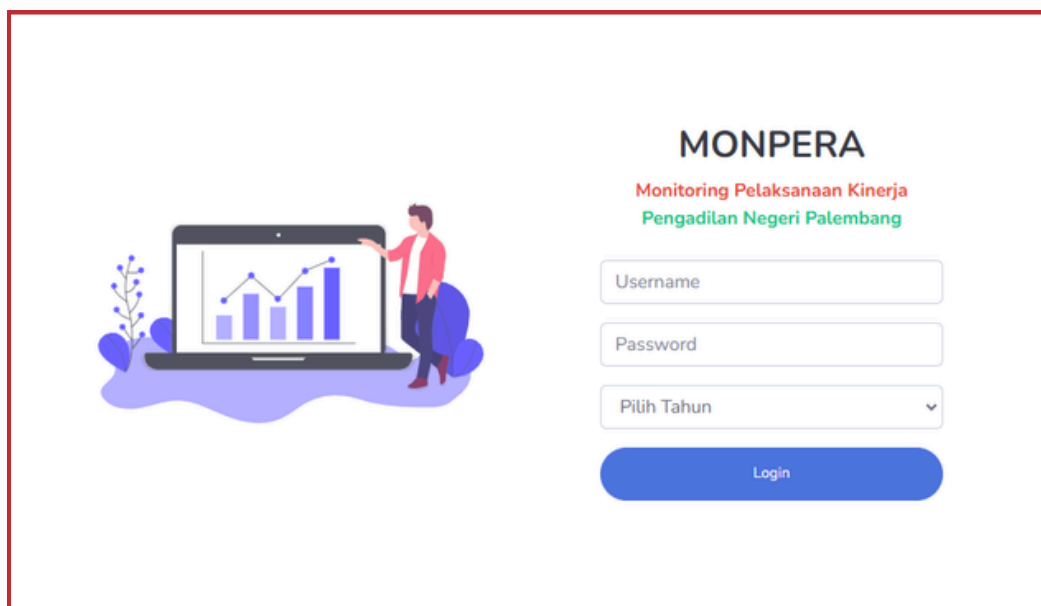
Gambar 12. Tampilan Formulir Permohonan Magang

This screenshot shows the 'Permohonan Riset' form in the ARISMA application. The form is titled 'Permohonan Riset / Penelitian Pada Pengadilan Negeri Palembang'. It contains several input fields: 'Nomor Surat Pengantar', 'Pembuat Permohonan Riset / Penelitian', 'Asal Universitas / Fakultas / Sekolah / Instansi / Organisasi', 'Nama Pemohon Riset', 'Nomor KTP', 'Alamat', 'Jenis Kelamin', and 'Agama'. There is also a section for 'No Telp (Wajibkan Pada WhatsApp / SMS)' and an 'Upload & Doc Permohonan (Berkas) dengan KTP Pemohon (2 File PDF, Max 3 MB)' section with a 'Choose File' button and a 'No file chosen' message. At the bottom, there are 'Simpan' and 'Batal' buttons.

Gambar 13. Tampilan Formulir Permohonan Riset/ Penelitian

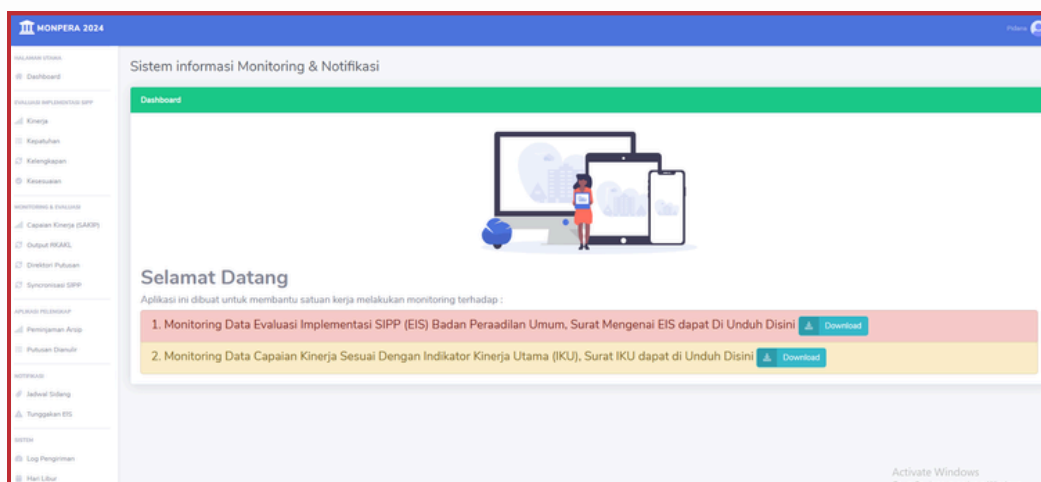
### 3 Monitoring Pelaksanaan Kinerja (MONPERA)

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus agar lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel maka, dipandang perlu penggunaan aplikasi pendukung kerja pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus membuat aplikasi MONPERA (Monitoring Pelaksanaan Kinerja).



Gambar 14. Halaman Awal MONPERA

Monpera merupakan aplikasi yang kompleks karena terdiri dari banyak fitur yang memudahkan setiap bagian maupun sub bagian untuk melihat informasi terkait tupoksi. Monpera terdiri dari menu (1) Evaluasi Implementasi SIPP, baik itu Kinerja, Kepatuhan, Kelengkapan dan Kesesuaian. (2) Monitoring dan Evaluasi, yaitu SAKIP, Output RKAKL, Direktori Putusan dan Synchronisasi SIPP. (3) Aplikasi Pelengkap, seperti Peminjaman Arsip dan Putusan Dianulir. (4) Notifikasi mengenai Jadwal Sidang dan Tunggakan EIS, serta menu (5) Sistem, yang terdiri dari Log Pengiriman dan info hari libur.



Gambar 15. Menu-menu di Aplikasi Monpera

# **BAB VI**

# **PENGAWASAN**

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan, disebutkan bahwa Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

## A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

### 1 Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara prefentif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Di lingkungan pengadilan tingkat pertama, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab pengawasan adalah pimpinan Pengadilan. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor 185/KPN.W6-UI/SK.KP4.1.3/XI/2025 tanggal 26 November 2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas Antar Bidang pada Pengadilan Negeri Palembang, yang tetap berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan.

Pengawasan bidang pada Pengadilan Negeri Palembang dilakukan dengan maksud untuk:

- Memeriksa program kerja;
- Mengevaluasi hasil kegiatan/pelaksanaan program kerja;
- Memberikan saran-saran untuk perbaikan;
- Melaporkan hasil temuan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Palembang;
- Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Palembang atau Pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut;

Susunan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, adalah sebagai berikut:

No	Nama Hakim	Pengawas Bidang	Pengawas Antar Bidang
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KRISTANTO S. H. SIANIPAR,S.H.,M.H</li> <li>• BUDIMAN SITORUS, S.H.</li> <li>• NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, S.H., M.H.</li> <li>• MASRIATI,S.H.,M.H</li> </ul>	Kepaniteraan Perdata	Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZULKIFLI,S.H.,M.H</li> <li>• Dr. RIMDAN, S.H., M.H.</li> <li>• CORRY OKTARINA,S.H</li> <li>• H.WAHYU AGUS SUSANTO,S.H.,M.H</li> </ul>	Kepaniteraan Pidana	Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AFRIZAL HADY, S.H., M.H.</li> <li>• IDI IL AMIN, S.H., M.H.</li> <li>• OLOAN HUTABARAT, S.H., M.H.</li> <li>• SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H.</li> </ul>	Kepaniteraan Hukum	Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGUS RAHARDJO,S.H</li> <li>• Dr. TARSIDI, S.H.,M.H</li> <li>• K.M. RUSDI, S.E., M.H., BKP</li> <li>• AHMAD BAYANI,S.H</li> </ul>	Kepaniteraan PHI	Kepaniteraan Tipikor
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WASLAM MAKHSID, S.H., M.H</li> <li>• ARDIAN ANGGA, S.H., M.H.</li> <li>• ISKANDAR HARUN, S.H., M.H.</li> <li>• H. KHOIRI AKHMADI, S.H., M.H.</li> </ul>	Kepaniteraan Tipikor	PTSP
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.</li> <li>• AGUSTRIAWAN, S.H., M.H.</li> <li>• PATTI ARIMBI, S.H., M.H.</li> </ul>	Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan	Kepaniteraan PHI
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ADE SUMITRA H, S.H., M.Hum.</li> <li>• EDUWARD, S.H., M.H.</li> <li>• TRI HANDAYANI, S.H., M.H.</li> </ul>	Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	Kepaniteraan Perdata
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FATIMAH, S.H., M.H.</li> <li>• PARMATONI, S.H.</li> <li>• PITRIADI, S.H., M.H.</li> </ul>	Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Kepaniteraan Hukum
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAMUEL GINTING, S.H., M.H.</li> <li>• CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.</li> <li>• HENDRI AGUSTIAN, S.H., M.Hum.</li> <li>• Dr. HARYANTO, S.H., M.H.</li> </ul>	PTSP	Kepaniteraan Pidana

Tabel 42. Susunan Hakim Pengawas Bidang

No	Nama Hakim	Pengawas Bidang	Pengawas Antar Bidang
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>AHMAD SAMUAR, S.H.</li> <li>PARULIAN MANIK, S.H., M.H.</li> <li>K.M. RUSDI, S.H., BKP.</li> </ul>	Sarana, Prasarana dan Keamanan Persidangan	Delegasi Masuk/Keluar dan Kejurusitaan
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>AGUS RAHARJO, S.H.</li> <li>ROMI SINATRA, S.H., M.H.</li> <li>SARJONO, S.H., M.H.</li> </ul>	Delegasi Masuk/Keluar dan Keejurusitaan	Olahraga
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>MASRIATI, S.H., M.H.</li> <li>ROMI SINATRA, S.H., M.H.</li> <li>H. WAHYU AGUS SUSANTO, S.H., M.H.</li> <li>THOBARI, S.H., M.</li> </ul>	Olahraga	Sarana, Prasarana dan Keamanan Persidangan

Tabel 42. Susunan Hakim Pengawas Bidang

Berikut jadwal kegiatan rapat berjenjang dan rapat bulanan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan Rapat
1	Minggu ke-1 Bulan Berjalan	Rapat berjenjang Hakim dan Pengawas Bidang dengan Sub-sub unit bagian teknis/non teknis
2	Minggu ke-2 Bulan Berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat Kepaniteraan</li> <li>• Rapat Kesekretariatan</li> </ul>
3	Minggu ke-3 Bulan Berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat berjenjang Wakil Ketua dengan Hakim Pengawas Bidang</li> <li>• Rapat berjenjang Wakil Ketua dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan</li> </ul>
4	Minggu ke-4 Bulan Berjalan	Rapat Bulanan dan Evaluasi Kinerja oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang

Tabel 43. Jadwal Kegiatan Rapat Berjenjang dan Rapat Bulanan

Pengawasan melekat dilakukan secara rutin/reguler dari Hakim Pengawas Bidang, Wakil Ketua, hingga Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau Laporan Hasil Pengawasan dengan susunan dan format yang sistematis yang dilengkapi dengan Undangan, Daftar Hadir/Absensi, Dokumentasi/Foto dan Notulen untuk selanjutnya dilaporkan kepada Hakim Pengawas Bidang, Wakil Ketua, hingga Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang kemudian di bahas dalam Rapat Bulanan Pembinaan dan Pengawasan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Pengawasan rutin/reguler juga dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang terhadap Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Adapun ruang lingkup pengawasannya adalah: Manajemen Peradilan; Administrasi Perkara; Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan; Administrasi Umum.



Gambar 16. Pengawasan Reguler Pengadilan Tinggi Palembang



Gambar 16. Pengawasan Reguler Pengadilan Tinggi Palembang

Selama Tahun 2025, Pengadilan Negeri Palembang mendapatkan 2 kali pengawasan dari Pengadilan Tinggi Palembang, sebagai berikut:

No	Tanggal	Jenis
1	24 - 25 Juni 2025	Pengawasan Rutin/Reguler Tahun 2025
2	05 - 06 November 2025	Pengawasan Rutin/Reguler Tahun 2025

Tabel 44. Jadwal Pengawasan Reguler Pengadilan Tinggi Palembang

## 2 Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan Lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh **Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia**. Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus mendapatkan pengawasan dari BAWAS MA RI pada tanggal 23 Oktober 2025 berupa Evaluasi dengan melakukan Tinjauan Dokumen, Uji Petik dan Wawancara terhadap Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP).



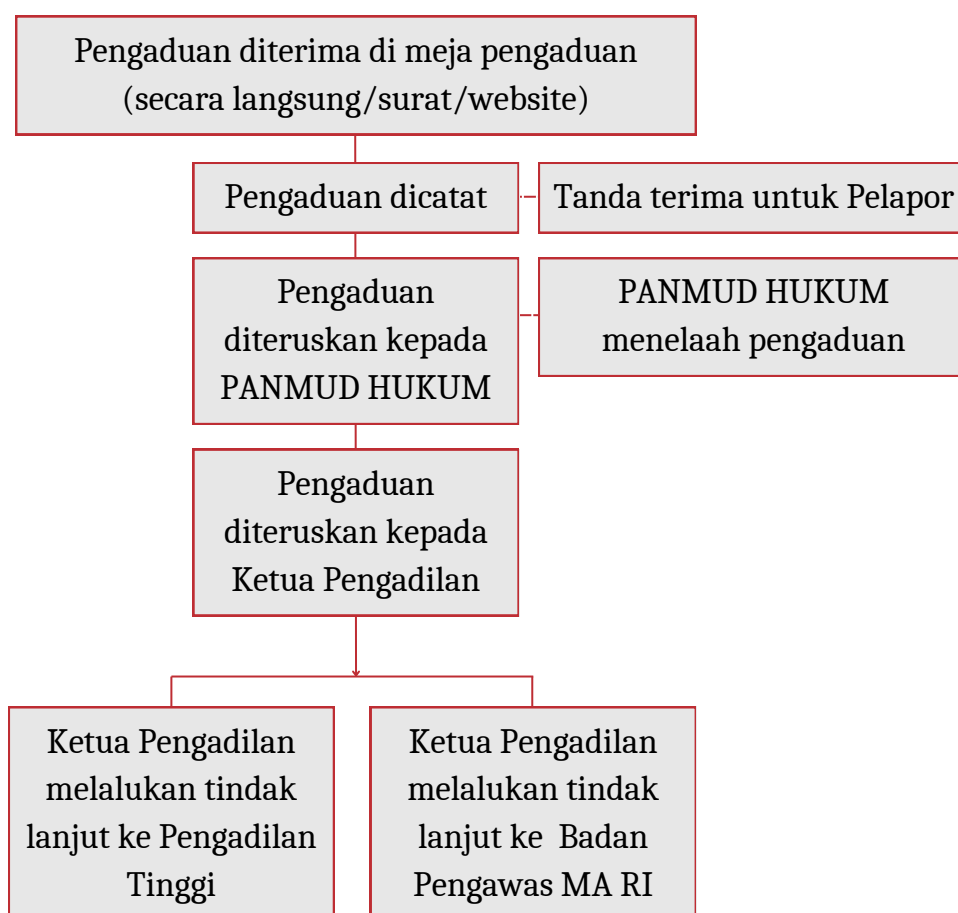
Gambar 17. Entry Meeting dan Closing Meeting Evaluasi SMAP oleh BAWAS MA RI

## B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan pada Pengawasan Melekat yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, baik yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan maupun Kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus selaku Koordinator Pengawasan Internal dan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

Sementara, terhadap temuan-temuan atau hasil Pengawasan Fungsional yang memerlukan tindak lanjut, Tim Pengawas merekomendasikan kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada Periode Pengawasan berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas berikutnya.

Alur penerimaan Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus adalah sebagai berikut:



## DATA JUMLAH PENGADUAN TAHUN 2025

No	Bulan	Sisa	Masuk	Klarifikasi	Sisa
1	Januari	0	3	3	0
2	Februari	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	1	1	0
6	Juni	0	7	7	0
7	Juli	0	5	5	0
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0
10	Oktober	0	1	1	0
11	November	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

# **BAB VII**

# **PENUTUP**

Di tahun 2025, Pengadilan Negeri Palembang terus berupaya meningkatkan pelayanan demi mewujudkan Visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Palembang Yang Agung”. Berbagai program pembaruan, tindak lanjut pembaruan dan peningkatan integritas Hakim dan aparatur pengadilan serta peningkatan kualitas layanan publik terus dilakukan untuk meraih kepercayaan publik dengan hasil sangat memuaskan. Seperti yang sudah diuraikan dalam laporan pelaksanaan kegiatan ini, bagaimana upaya Pengadilan Negeri Palembang mampu meraih berbagai prestasi. Semangat kebersamaan dan kerja sama yang telah diberikan oleh seluruh warga Pengadilan Negeri Palembang menjadi faktor penentu atas pelbagai keberhasilan yang diraih selama tahun 2025.

## **A. KESIMPULAN**

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini, dapat disimpulkan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja dalam pengelolaan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, antara lain:

1. Kebijakan Umum yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja demi mewujudkan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin;
2. Setiap aparatur yang ada sudah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
3. Manajemen dan Pengelolaan perkara masih menyisakan perkara pada tahun 2026 dan menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan pada 2026 nanti, mengingat peningkatan jumlah perkara yang masih dalam proses sampai akhir tahun 2025;
4. Pengelolaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik, mengingat banyaknya Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun Pelaksana yang dikirim untuk mengikuti berbagai Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan seminar untuk meningkatkan profesionalisme kerja;
5. Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus telah dijalankan dengan disiplin an terus menerus dikembangkan agar lebih efektif dan obyektif;
6. Pengelolaan Aset pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada dan telah berjalan dengan cukup baik;
7. Pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standard operasional prosedur (SOP).

## B. REKOMENDASI

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja, serta perlu ditambah anggaran pemeliharannya;
2. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya penambahan pegawai pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus mengingat sumber daya manusia yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas;
3. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang prima.

# LAMPIRAN



## **PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS  
Nomor : 21 /KPN.W6.U1/KP3.4/1/2025**

### **TENTANG**

**PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024  
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS  
KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja perlu menyusun laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024
  - b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Negeri Palembang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;  
Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.;
  4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;  
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi
  6. Mahkamah Agung RI .

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS**
- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Nomor 14/KPN.W6.U1/KP3.4.1/1/2024 tanggal 10 Januari 2024;

- KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kegiatan Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini ;
- KETIGA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kegiatan Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus.
- KEEMPAT : Tim bertugas menghimpun data-data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan kegiatan Tahun 2024 dengan berpedoman outline dari Mahkamah Agung R.I.
- KELIMA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

 KETUA  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

AGUS WALUJO TJAHJONO



## PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
PENUNJUKKAN TIM LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024  
PADA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS I A KHUSUS

Nomor : 21 /KPN.W6.U1/KP3.4/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

NO.	NAMA	JABATAN	WEWENANG/ TUGAS
1.	AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum.	KETUA	Pembina
2.	FAUZI ISRA, S.H., M.H.	WKPN	Penasehat
3.	M. TEGUH, S.E., S.H., M.H.	Panitera	Ketua
4.	NAIN MEITULU, S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua
5.	JUNAIDI, S.Psi., M.Si.	Kabag Umum	Sekretaris
6.	AGUSMAN, S.H.,M.H.	Panmud Perdata	Anggota
7.	M. AFIUDIN, S.H., M.H.	Panmud Tipikor	Anggota
8.	SUHANDA, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
9.	ENRIK PEDI ENDORA, S.H., M.M.	Panmud Hukum	Anggota
10.	DEDI SOHAIDI, S.H.	Panmud PHI	Anggota
11.	Hj.DEWI CLARA THURSIDA, S.H.,M.H	Kasubbag TU da Keuangan	Anggota
12.	OLIVIA TERISIA, S.H., M.Si	Kasubbag Kepegawaian & ORTALA	Anggota
13.	ZWESTI DAMAYANA, S.Kom.,M.H	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
14.	EVA AGUSTINA, S.I.P.	Analisis Tata Laksana	Anggota
15.	ATIK KARTINI, S.H., M.Si.	Analisis Tata Laksana	Anggota
16.	MELINDA THIOVANI S, S.AP.	Analisis Tata Laksana	Anggota

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KETUA  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG

AGUS WALUJO TJAHJONO